



BAKEUDA

# LAPORAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena atas Anugerah dan cinta kasihnya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan harus di capai, juga sebagai bahan evaluasi dalam rangka upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Secara umum, target dan sasaran kinerja periode Triwulan I Tahun 2025 ini telah dapat dicapai sesuai yang di targetkan. Pencapaian yang baik pada periode ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2025. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT maupun pihak lainya perlu di jaga untuk mencapai kinerja yang telah ditergetkan.

Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, atas tersusunya laporan ini. Kami berharap kritik membangun untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Semoga laporan kinerja triwulan I Tahun Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, April 2025

g  
Plt.KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



*Subi*  
Drs. BENHARD MENOH, MT  
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)  
NIP. 19720512 199101 1 001

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	3
1.4 Organisasi dan Personalia .....	3
1.5 Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah .....	7
2.2 Target Kinerja.....	8
2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025.....	10
<b>BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian .....	17
A. Pelayanan Administrasi dan Umum.....	17
B. Kepegawaian .....	18
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	20
A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah.....	20
1. Realisasi Pendapatan .....	20
2. Realisasi Belanja .....	26
B. Kinerja Badan Keuangan Daerah.....	34
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	34
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Permasalahan dan Solusi .....	60
1. Sekretariat .....	60
2. Anggaran .....	61
3. Bidang Perbendaharaan .....	63
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan .....	66
4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5
---	---

## DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah .....	8
2.2 Penganggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025 .....	10
3.1 Rekapitulasi Surat Masuk .....	17
3.2 Rekapitulasi Surat Keluar .....	17
3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	18
3.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan .....	18
3.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	19
3.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum.....	19
3.7 Komposisi Tenaga Kontrak .....	20
3.8 Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan.....	20
3.9 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah.....	26
3.10 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Anggaran.....	39
3.11 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	42
3.12 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Perbendaharaan.....	49
3.13 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan Maret Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai program kegiatan dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

### **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006).

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan Maret Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

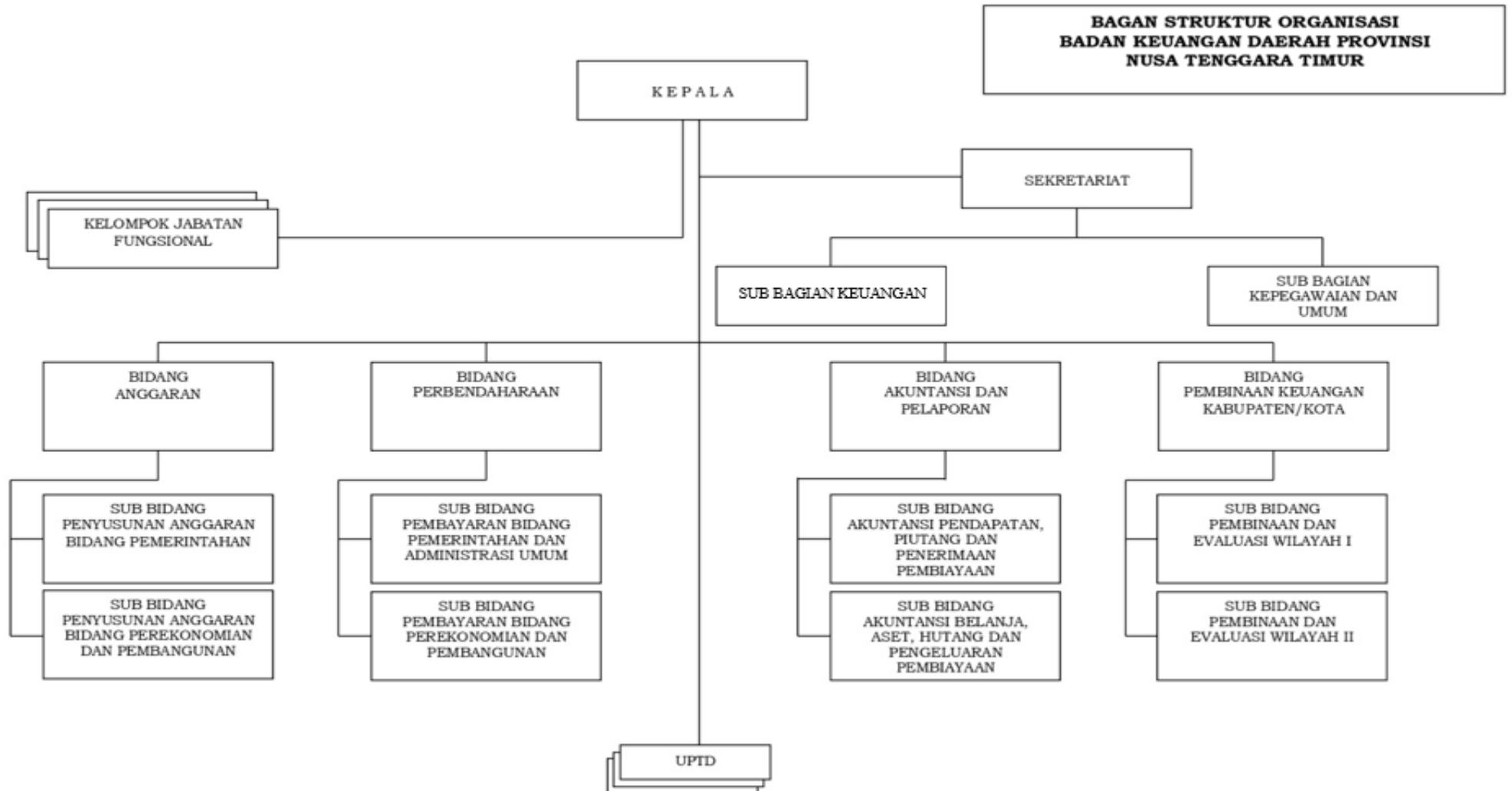
### **1.4 Organisasi dan Personalia**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Sub Keuangan
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
  - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
  - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
  - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1



## **1.5 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Kinerja Bulan Maret Tahun Anggaran 2025 ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

### **BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Target Kinerja**

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	100 %
		2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 %

## B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	<b>APBD</b>		
a.	<b>Belanja (Program)</b>	<b>Rp. 781.634.764.109,-</b>	<b>Realisasi minimal 85%</b>
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 18.188.331.972.-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 763.446.432.137,-	Realisasi minimal 85%
b.	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp. 3.416.155.613.857,-</b>	<b>Realisasi minimal 90%</b>
	<b>Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)</b>	<b>Rp. 4.197.790.377.966,-</b>	<b>Realisasi minimal 90%</b>

2.	<b>APBN</b>		
a.	<b>Program Dekonsentrasi</b>	Rp.	-
	1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	-
	2. Bina Administrasi Kewilayahan	Rp.	-
b.	<b>Program Tugas Pembantuan</b>	Rp.	-
	<b>Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan</b>	Rp.	-

### 2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**

#### **Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025**

						<b>KEUANGAN</b>	<b>781.634.764.109</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>781.634.764.109</b>
<b>0</b>	<b>1</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.188.331.972</b>
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.894.096
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000
1	1	0	1	1	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.562.328.600</b>
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.070.629.000
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000

1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>335.843.000</b>
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.685.000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.600.775.956</b>
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	454.729.000
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000

1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>234.824.000</b>
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.000.000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.723.846.320</b>
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.280.920
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>300.820.000</b>
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000
<b>0</b>	<b>2</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>763.446.432.137</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>11.036.154.325</b>
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	159.014.000
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.362

2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.025.873.200
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.444.122.963
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.272.027.005</b>
2	2	0	2	0	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500
2	2	0	2	0	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1.000.000
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000
2	2	0	2	0	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	1.000.000

						Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
2	2	0	2	0	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	101.550.505
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>2.382.903.796</b>
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.607.600
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	404.848.400
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	631.832.200
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300

2	2	0	3	0	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1.000.000
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2.671.638.502</b>
2	2	0	4	0	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1.000.000
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330.735.212
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990
2	2	0	4	0	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300
2	2	0	4	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.000.000
2	2	0	4	0	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	1.000.000
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>745.083.708.509</b>
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	46.356.898.400

2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.180.954.686
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian**

**A. Pelayanan Administrasi dan Umum**

1. Surat Masuk

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT**  
**Kondisi Per Januari s.d Maret 2025**

Unit	Jumlah Surat Masuk		
	Januari	Februari	Maret
Sekretariat	83	58	48
Bidang Anggaran	70	69	109
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	59	53	53
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	16	15	10
Bidang Perbendaharaan	98	109	63
<b>Jumlah</b>	<b>326</b>	<b>304</b>	<b>283</b>
<b>Total</b>	<b>913</b>		

*Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

2. Surat Keluar

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT**  
**Kondisi Per Januari s.d Maret 2025**

Unit	Jumlah Surat Keluar		
	Januari	Februari	Maret
Sekretariat	67	58	106
Bidang Anggaran	7	7	13
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	17	17	16
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	10	13	13
Bidang Perbendaharaan	59	31	46
<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>126</b>	<b>329</b>
	<b>615</b>		

*Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

## B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 63 orang, dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan 31 Maret 2025).

### 1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

**Tabel 3.3**

**Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional  
Kondisi Per Januari s.d Maret 2025**

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	0 orang	II-a	Tidak Ada
2.	Sekretaris	0 orang	III-a	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang	3 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	9 orang	IV-a	Ada
5.	Fungsional Tertentu	8 orang		Ada
6.	Pelaksana	42 orang		
<b>Total</b>		<b>63 orang</b>		

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

### 2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

**Tabel 3.4**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan  
Kondisi Per Januari s.d Maret 2025**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	6	6	-	1	10	1
2.	Bidang Anggaran	7	4	-	-	8	3
3.	Bidang Perbendaharaan	3	10	-	-	13	0
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	3	10	-	-	11	3
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	6	-	1	10	2
Jumlah		27	36		2	52	9
<b>Total</b>		<b>63</b>		<b>63</b>			

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

3. Berdasarkan Agama

**Tabel 3.5**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama**  
**Kondisi Per Januari s.d Maret 2025**

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	6	5	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	5	6	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	6	6	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	7	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	10	1	1	1	-
<i>Jumlah</i>		33	25	4	1	-
<b>Total</b>		<b>63</b>				

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

4. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 3.6**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum**  
**Kondisi Per Januari s.d Maret 2025**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	1	7	2
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	1	-	7	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	9	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	6
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	1	5	4
<i>Jumlah</i>		-	-	5	5	2	35	16
<b>Total</b>		<b>63</b>						

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

## 5. Tenaga Kontrak

**Tabel 3.7.**  
**Komposisi Tenaga Kontrak Daerah**  
**Kondisi 31 Maret 2025**

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	38
2	PEREMPUAN	30
<b>Total</b>		<b>68 orang</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

### 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah

##### 1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Target Pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.416.135.171.857,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi 31 Maret 2025:

**Tabel. 3.8**  
**Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah**  
**Kondisi 31 Maret 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.416.135.171.857</b>	<b>699.765.305.181</b>	<b>18,59</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>119.519.178.857</b>	<b>1.475.707.462</b>	<b>2,59</b>
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857		
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal	62.519.178.857		

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	pada BUMN			
4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	62.250.000.000		
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	269.178.857		
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	57.000.000.000	1.475.707.462	2,59
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000	514.757.421	10,30
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	514.757.421	10,30
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	514.757.421	10,30
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000		
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000		
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000		
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	30.000.000.000	222.434.918	0,74
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	222.434.918	0,74
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	222.434.918	0,74
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas	10.000.000.000	100.516.595	1,01

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000	637.998.527	5,80
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000		
4.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000,		
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000.000	637.998.527	6,38
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000.000	637.998.527	6,38
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.615.993.000	698.183.522.719	21,18
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.615.993.000	698.183.522.719	21,18
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.296.615.993.000	698.183.522.719	21,18

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.631.985.000	383.721.000	0,62
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.059.812.000		
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	48.258.335.000		
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.760.954.000		
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.064.825.000	261.706.250	24,58
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	397.747.000	99.436.750	25,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	90.312.000	22.578.000	25,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.132.047.308.000	445.085.386.014	20,88
4.2.01.01.02.0001.	DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.542.866.521.000	445.085.386.014	28,85
4.2.01.01.02.0004.	DAU tambahan dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK			
4.2.01.01.02.0005.	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan	445.245.671.000		
4.2.01.01.02.0006.	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan	41.141.397.000		
4.2.01.01.02.0007.	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum	102.793.719.000		
4.2.01.01.03.	DANA ALOKASI KHUSUS	133.541.747.000	375.000.000	0,28
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA	133.541.747.000		
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB			
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMK			

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan		375.000.000	
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan stunting			
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan Kesehatan			
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah -penugasan- pembangunan sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM			
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan			
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik Bidang Jalan- Penugasan			
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang jalan- penugasan Keselamatan jalan			
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang irigasi penugasan			
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan Kehutanan			
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan Penugasan			
4.2.01.01.03.0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan			
<b>4.2.01.01.04.</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>962.694.182.000</b>	<b>252.339.415.705</b>	<b>26,21</b>

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	962.694.182.000	252.339.415.705	26,21
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja			
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD		4.618.304.205	
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD			
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD			
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya			
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		100.000.000	
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS			
4.2.01.01.04.0022	Dana Pelayanan Perlindungan Anak			
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM			
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM			
<b>4.2.01.06.01.0001.</b>	<b>DANA INSENTIF FISKAL</b>	<b>6.700.771.000</b>		
4.2.01.06.01.0001.	Dana Insentif Fiskal	6.700.771.000		
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		106.075.000	
4.3.01.	Pendapatan Hibah		106.075.000	
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		106.075.000	
4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta		106.075.000	

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dalam Negeri			
4.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan		106.075.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.416.135.171.857</b>	<b>699.765.305.181</b>	<b>20,48</b>

*Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)*

## 2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 781.634.764.109,-** Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah**  
**Kondisi 31 Maret 2025**

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	781.634.764.109	1.927.790.158	0,25%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	781.634.764.109	1.927.790.158	0,25%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.188.331.972	711.435.185	3,91%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.894.096	66.797.000	16,30%
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000	30.454.000	46,68%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800		0,00%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727	36.343.000	47,26%
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569		0,00%
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	50.000.000		0,00%
1	1	0	1	0	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000		0,00%
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.562.328.600</b>	<b>97.908.200</b>	<b>0,85%</b>
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.070.629.000		0,00%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600		0,00%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	21.939.000	14,63%
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000		0,00%
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000	37.561.000	67,77%
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000	38.408.200	58,62%
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000		0,00%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000		0,00%
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>21,32%</b>
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan	10.000.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
1	1	0	3	0	5	<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>42,64%</b>
1	1	0	5			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>335.843.000</b>	<b>46.808.860</b>	<b>13,94%</b>
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000	41.014.660	29,07%
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000	5.794.200	6,36%
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		0,00%
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.685.000		0,00%
1	1	0	6			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.600.775.956</b>	<b>301.253.046</b>	<b>18,82%</b>
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000	300.000	0,73%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000	56.000	0,21%
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	62.424.207	17,57%
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000	9.980.000	13,77%
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	69.591.444	34,80%
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	454.729.000	96.246.495	21,17%
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000	62.654.900	14,95%
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436		0,00%
1	1	0	7			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>234.824.000</b>		<b>0,00%</b>
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.000.000		0,00%
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.723.846.320</b>	<b>128.629.800</b>	<b>3,45%</b>
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	629.800	1,72%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000	125.000.000	16,03%
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.280.920	3.000.000	0,10%
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>300.820.000</b>	<b>65.774.279</b>	<b>21,86%</b>
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	55.279.979	23,34%
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	10.494.300	23,85%
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000		0,00%
<b>0</b>	<b>2</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>763.446.432.137</b>	<b>1.216.354.973</b>	<b>0,16%</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>11.036.154.325</b>	<b>521.535.736</b>	<b>4,73%</b>
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000		0,00%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000		0,00%
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	159.014.000	96.189.100	60,49%
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800		0,00%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.362		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.025.873.200	376.846.636	12,45%
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.444.122.963	48.500.000	1,41%
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.272.027.005</b>	<b>57.634.000</b>	<b>2,54%</b>
2	2	0	2	0	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000		0,00%
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000		0,00%
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000		0,00%
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500	5.279.000	0,72%
2	2	0	2	0	6	sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1.000.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000	25.280.000	22,95%
2	2	0	2	0	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Deareh	101.550.505	27.075.000	26,66%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	3			<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>2.382.903.796</b>	<b>237.081.255</b>	<b>9,95%</b>
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296	88.542.380	20,45%
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.607.600		0,00%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	404.848.400		0,00%
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	631.832.200	148.538.875	23,51%
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300		0,00%
2	2	0	3	0	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1.000.000		0,00%
2	2	0	4			<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2.671.638.502</b>	<b>400.103.982</b>	<b>14,98%</b>
2	2	0	4	0	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1.000.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Daerah			
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	330.735.212	48.309.000	14,61%
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990	153.313.000	27,34%
2	2	0	4	0	4	konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000	198.481.982	25,75%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300		0,00%
2	2	0	4	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.000.000		0,00%
2	2	0	4	0	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1.000.000		0,00%
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>745.083.708.509</b>		<b>0,00%</b>
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484		0,00%
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	46.356.898.400		0,00%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan	22.180.954.686		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Mendesak			
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939		0,00%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Maret 2025

## B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Sampai dengan 31 Maret 2025, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari 13 kegiatan dan 74 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 2 (dua) program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini secara teknis menjadi tanggungjawab Sekretariat Badan Keuangan Daerah adapun Pagu sebesar Rp. 18.188.331.972,- Terealisasi sebesar Rp. 711.435.185,- dengan presentase (3,91%);

#### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah, dan Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah. Pagu sebesar Rp. 409.894.096,- Realisasi sebesar Rp. 66.797.000,-(16,30%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- ⇒ Terlaksananya Pelaporan Realisasi Keuangan dan fisik serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPSMD secara tahunan, pencapaian renstra secara tahunan, dan target indikator secara bulanan dan triwulan kepada Bapperida melalui aplikasi e. Monev performance.
- ⇒ Terlaksananya Beberapa fungsi dari pimpinan berupa:
  - a) Penyusunan materi rapat.
  - b) Mewakili pimpinan untuk mengikuti rapat maupun kegiatan lainnya.
  - c) Tugas-Tugas Lainnya.

**b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 11.562.328.600,- Realisasi Rp97.908.200,-(0,85%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan.
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada pengguna Anggaran.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada BUD.
- ⇒ SPJ fungsional kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ SPJ Administrasi kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ Pengisian buku cek dan pengembalian tunai uang kas di Bank .
- ⇒ Menerima dan menyimpan uang persediaan .
- ⇒ Membukukan penyeteroran atas pungutan Pajak.

⇒ Membuat rekapitulasi data realisasi belanja bunga, belanja DBH, bantuan keuangan dan BTT.

**c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp 4.264.000,- (21,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.

⇒ Tersusunnya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

**d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 335.843.000,- Realisasi Rp. 46.808.860,- (13,94%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.

⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.

⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.

⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.

⇒ Pengusulan Pensiun.

⇒ Penyusunan Laporan Implementasi SPBE Tahun 2023.

⇒ Pengusulan Kenaikan Pangkat .

⇒ Penginputan Anjab ABK Tahun 2025 Pada Aplikasi Sinjab 3.8.

**e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.600.775.956,- Realisasi Rp. 301.253.046,-(18,82%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material.

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 234.824.000,-Realisasi Rp.0 ,- (0%).

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar Rp. 3.723.846.320,- Realisasi

Rp. 128.629.800,- (3,45%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat.

**h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp 300.820.000,- Realisasi Rp. 65.774.279,- (21,86). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :  
⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

## **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 763.446.432.137,- Realisasi Rp. 1.216.354.973,- Presentase (0,16%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

### **a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 11.036.154.325,- Realisasi Rp. 521.535.736,- (4,73%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
6. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
7. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA;
8. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.

9. Konsultasi terkait Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025 (Badan Pendapatan dan Aset Daerah);
10. Konsultasi terkait User dan Password Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (Dinas Kelautan Dan Perikanan);
11. Konsultasi terkait Aplikasi SIPD (UPTD Pelayanan Perempuan dan Anak );
12. Konsultasi terkait Anggaran BPJS Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi);
13. Konsultasi terkait Pembahasan DAU Spesifik Grant Tahun Anggaran 2025 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
14. Konsultasi terkait Surat Perihal Permohonan Nama Tim BLUD (Dinas Kelautan Dan Perikanan UPTD PTP Alor);
15. Konsultasi terkait Rasionalisasi Anggaran (Biro Administrasi Pimpinan Setda);
16. Konsultasi terkait Dana Hibah (Badan Pengawas Pemilihan Umum).
17. Konsultasi terkait Laporan Efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025 (Kabupaten Kupang).

**Tabel 3.10**

**Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah  
Kondisi 31 Maret 2025**

<b>Program</b>	<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Target (dokumen/kegiatan /buku)</b>	<b>Realisasi (dokumen/kegiatan /buku)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan	- Rapat terkait Pemaparan Materi Skenario Penetapan NIP Calon ASN dan Pemaparan Materi Kebijakan Anggaran	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

	Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	untuk Gaji dan Tunjangan ASN		
		- Rapat terkait Pemaparan Program/Kegiatan untuk Mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan Kebijakan Penggunaan DAU Spesifik Grant (DAU SG) Tahun 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan Usulan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025 terkait Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU Spesifik Grant), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik serta Kegiatan Dasa Cita	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Mekanisme Kelanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas sosial	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan Pemberian Bonus Atlet Pekan Olahraga Nasional	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

		(PON) XXI/2024 dan Pekan Paralympic Nasional (PEPAPERNAS) XVII/2024 serta permasalahan lainnya		
		- Rapat terkait Pembahasan Mekanisme Perhitungan Belanja Modal (Aset)	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Melakukan Pembahasan terkait Skenario Pemetaan Rencana Penggunaan DAU Spesifik Grant (DAU SG) Tahun 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Melakukan Pemetaan Pergeseran APBD tahap I dan tahap II	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Melakukan Pemetaan Usulan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025 terkait Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU Spesifik Grant), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik serta Kegiatan Dasa Cita untuk Mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

**b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.272.027.005,- Realisasi Rp. 57.634.000,- (2,54%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.11**

**Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Kondisi 31 Maret 2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA</b>	<b>BENTUK/ WUJUD</b>	<b>REALISASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
<b>PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				
<b>KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2025

C.	<p>Sub kegiatan :  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :</p>			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2025
D.	<p>Sub kegiatan :  Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah</p>			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025
	<p>1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :</p>			
	<p>2. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</p>	<p>List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 28 Maret 2025 sebanyak 1</p>	<p>1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan</p>	<p>Berlanjut untuk bulan Maret Tahun 2025 yang akan dilaporkan di bulan April</p>

	pada 22 Kabupaten/Kota	(satu) dokumen	Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama .	Tahun 2025
	3. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2023	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
E.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			
F.	Asistensi Pengelolaan Keuangan DBH-CHT Kab/Kota			
	1. Pembuatan administrasi dalam rangka pelaksanaan Rapat pembahasan RKP DBH CHT TA 2025 antara lain: a. Surat undangan ke kabupaten/kota b. Jatwal pembahasan RKP DBH CHT TA 2025 c. Surat permintaan narasumber yang ditujukanke pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan Dan Kantor	Administrasi dalam rangka pelaksanaan Rapat pembahasan RKP DBH CHT TA 2025	Terselenggaranya Rapat pembahasan RKP DBH CHT TA 2025 secara zoom meeting dengan dihadiri oleh Narasumber dan peserta dari kabupaten/kota antara lain: 1. Pejabatdari Kementerian Keuangan RI 2. Pejabatdari Kementerian Pertanian RI 3. Pejabatdari	

	<p>Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang.</p> <p>d. Berita Acara pembahasan RKP DBH CHT TA 2025.</p>		<p>Kementerian Kesehatan RI</p> <p>4. Pejabat dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang</p> <p>Peserta yang hadir yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat dan Pelaksana dari BPPKAD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT</li> <li>2. Pejabat dan Pelaksana dari Dinas Pertanian Kab/Kota se-Provinsi NTT</li> <li>3. Pejabat dan Pelaksana dari Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT</li> <li>4. Pejabat dan Pelaksana dari Dinas Perindag Kab/Kota se-Provinsi NTT</li> <li>5. Pejabat dan Pelaksana dari kantor Satpol PP Kab/Kota se-Provinsi NTT</li> </ol>	
	<p>2. Pelaksanaan Rapat pembahasan RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2025 bersama tim Kementerian</p>	<p>Rapat pembahasan RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2025</p>	<p>Adanya berita acara hasil pembahasan RKP DBH CHT Tahun Anggaran 2025 dari</p>	<p>Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2025 secara</p>

	teknis dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur	bersama tim Kementerian teknis dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur	masing-masing bidang yakni bidang kesmas, bidang kesehatan, bidang penegakkan hukum	zoom meeting
G.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Maret 2025	Laporan kegiatan bulan Maret 2025	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Maret 2025 kepada Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Telah disampaikan ke Sekretariat Badan Provinsi NTT pada hari Rabu, 9 April 2025
	2. FGD dengan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran APBD Provinsi dan Kab/Kota	FGD dengan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran APBD Provinsi dan Kab/Kota	Terinformasinya perkembangan realisasi APBD Provinsi dan Kab/Kota Bulan Februari TA 2025 dan factor-faktor yang menjadi penunjang percepatan realisasi dan factor-faktor yang menjadi penghabat realisasi APBD Provinsi dan Kab/Kota Bulan Februari TA 2025	FGD dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Maret 2025 <i>time</i> 14.00 Wita
	3. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, kabupaten TTS, Kabupaten Sabu Raijua terkait	Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Kupang, Kabupaten	Terinformasinya berbagai hal terkait pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi perencanaan	

	pengelolaan keuangan daerah	Malaka, kabupaten TTS, Kabupaten Sabu Raijua terkait pengelolaan keuangan daerah	penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	
I.	Tugas Tambahan : Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian :			
	1. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2023 maupun SKP Tahun 2024)	Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024	Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala	Berlanjut untuk bulan April 2025
	2. Mengikuti rapat pelaksanaan pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2025	Rapat pelaksanaan pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2025	Adanya kesepakatan terkait mekanisme pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2025	Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda pada Hari Selasa, 18 Maret 2025
	3. Mengikuti rapat-rapat TAPD	Rapat terlaksana sesuai undangan	Dibahasnya beberapa agenda terkait <i>Quick Win</i> Gubernur/Wakil Gubernur	Berlanjut pada rapat-rapat berikutnya
	4. Mengikuti rapat-rapat bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Rapat terlaksana sesuai undangan	Membahas program Dasa Cita Gubernur	Berlanjut pada rapat-rapat berikutnya

### c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 2.382.903.796,- Realisasi Rp. 237.081.255,- (9,95%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

1. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)  
Saldo awal Rp. 316.188.621.257,34 realisasi Penerimaan sebesar Rp. 160.146.662.912,91 sedangkan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp. 264.718.017.690,-,- dan sisa saldo RKUD per 31 Maret 2025 sebesar Rp. 211.617.266.480,25,-
2. Saldo Deposito Rp. 125.000.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:
  - Bank BNI Rp. 35.000.000.000,-
  - Bank BRI Rp. 35.000.000.000,-
  - Bank Mandiri Rp. 35.000.000.000,-
  - Bank NTT Rp. 20.000.000.000,-
3. Realisasi Keuangan khusus Bidang Perbendaharaan dengan anggaran sebesar Rp.2.382.903.796,- terealisasi Rp. 180.721.255,- atau 8 % yang terdiri dari:
  - a. Sub Kegiatan 02.1.03.0001 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah terealisasi Rp. 87.319.380,- atau 21 % dari anggaran sebesar Rp.433.044.296,-
  - b. Sub Kegiatan 02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD anggaran sebesar Rp.322.607.600,-
  - c. Sub Kegiatan .02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya anggaran sebesar Rp.404.848.400,-
  - d. Sub Kegiatan 02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah terealisasi Rp. 93.401.875,- atau 15 % dari anggaran sebesar Rp.631.832.200,-
  - e. Sub Kegiatan 02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang

daerah sebagai optimalisasi kas anggaran sebesar Rp.589.571.300,-

- f. Sub Kegiatan 02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-

**Tabel 3.12**

**Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah  
Kondisi 31 Maret 2025**

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI	KET
Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah Terdiri Dari SP2D : 236 Doc LS Gaji PNSD 60 Doc & Guru (Gaji Induk) LS Terusan gaji 12 Doc LS Kekurangan Gaji 1 Doc LS Gaji Susulan 5 Doc LS Gaji PPPK 6 Doc LS Gaji PPPK 1 Doc THR LS Gaji THR 41 Doc LS Susulan Gaji THR 5 Doc LS Gaji Terusan THR 4 Doc GU 10 Doc TU 1 Doc LS TPP 15 Doc LS Honorer 52 Doc	

			LS DPRD            6        Doc LS Barang dan    14       Doc Jasa LS Belanja        3        Doc Transfer	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)  Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	SuratPengantar : 1. 900.1/429/BKUD3.1 Tgl. 03 Maret 2025	
		Membuat SKPP	SKPP BUP Doc : 48 SK	

		(Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP : 12 SK Meninggal SKPP : 1 SK Pensiun Dini	
		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat: PNS (SKPD) : 717 Orang PNS Guru : 374 Orang PPPK Tahap I : 10 Orang PPPK Tahap II : 8 Orang PPPK P1 : 11 Orang	
		Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2025	- Verfikasi berkas - Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen - Pencetakan Daftar Gaji - Pencetakan SP2D - Realisasi Pembayaran	
		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaan : 3.789 Doc Pengeluaran : 236 Doc	
		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	3.789 Doc	
		Melakukan Rekapitulasi dan penyetoran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari	PNS pada 35 OPD Lingkup Pemprov. NTT,OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	

		beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22		
		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	236 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Februari 2025 ke KPP Pratama Kupang	Surat Pengantar Nomor : 900.1.13.1/478/BKUD3.1 Tanggal 07 Maret 2025	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, bukti billing iuran wajib pegawai dan bukti billing iuran asuransi kesehatan bulan Februari 2025	Surat Pengantar Nomor :  1. 900.1/493/BKUD3.1 2. 900.1/494/BKUD3.3 Tgl . 10 Maret 2025	
	<b>Pengagendaan Surat</b>	Surat Masuk Surat Keluar	Total = 122 Surat Total = 21 Surat	
		Melakukan pengiriman bukti	34 Setoran	

		pembayaran beras ke Bulog Bulan Februari 2025		
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Maret 2025	LHP BPK RI (23 kasus) Nominal Rp. 27.442.586,- LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT ( 13 kasus) Nominal Rp. 1.690.024.031,- Kelebihan Tj. Keluarga PNS Model C (99 Kasus) Nominal Rp. 835.100.582,- Rincian terlampir	
		Penginputan perubahan gaji tanggal 1-10 setiap bulannya pada SIM Gaji Web	Tepat waktu	
		Operator pada Aplikasi Gaji melakukan Print daftar gaji	Untuk dibayarkan pada gaji bulan April	
		Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy & hardcopy) yang sudah ditandatangani dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah terlambat menyampaikan laporan DAU	

		setiap		
		bulannya. Apabila tidak dipenuhi maka penyampaian DAU bulan berikutnya di tunda		
		Penyusunan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman Ekonomi (PEN) Daerah antara PT. SMI dan Pemprov. NTT yang dikirim paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut harus terlebih dahulu sudah di reviu oleh Inspektorat daerah sebelum dikirim ke PT. SMI melalui aplikasi REVINA	Selalu tepat waktu	
		Melakukan Pengiriman Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara ke KPPM	Nomor : 900.1.13.1/472/BKUD3.1 Tgl. 06 Maret 2025	
		Penyampaian	900.1/586/BKUD3	

		Data BNBA Penyetoran IW PNSD dan IW Penda bagi ASN Provinsi NTT Ke Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Tgl. 20 Maret 2025	
--	--	---	--------------------	--

**d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.671.638.502,- Realisasi Rp 400.103.982,- (14,98%) . Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

1. DAP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2025

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub – sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 terealisasi senilai Rp. 0,00,- atau 0 %.
- b. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,pembiayaan.pendapata-IO, dan beban jumlah anggaran sebesar Rp. 330.735.212,- sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 terealisasi Rp.48.309.000,- atau (14.61%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.560.726.990,- dan sampai dengan 31 Maret 2025 realisasi Sebesar Rp.153.313.000,- Atau (27,34%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
- d. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 770.670.000,-sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 terealisasi sebesar Rp.5.776.818,- atau (0,75%).

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.006.506.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar Rp.0,00,- atau 0% Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan:
- f. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan paduan teknis oprasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 31 Maret 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
- g. Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 31 Maret 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% .

**Tabel 3.13**

**Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Kondisi per 31 Maret 2025**

<b>Program</b>	<b>Rincina Kegiatan</b>	<b>Target (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Realisasi (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Ket</b>
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1 Laporan		

<b>Program</b>	<b>Rincina Kegiatan</b>	<b>Target (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Realisasi (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Ket</b>
	Daerah.			
	2. Sub kegiatan rekonseliasi dan ferifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan.p endapata-lo, dan Beban	3 Dokumen		
	3. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran .	3 Dokumen 1.Laporan Bulanan. 2.Laporan Triwulan. 3.Laporan semester.		
	4. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen 1. 35 Lk SKPD 2. 4 Lk BUMD 3. 1 LKPD		
	5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	4 Dokumen 1. Ranperda 2. Ranpergub 3. Perda 4. Pergub		

<b>Program</b>	<b>Rincina Kegiatan</b>	<b>Target (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Realisasi (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Ket</b>
	tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT			
	6. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan paduan teknis oprasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
	7. Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 orang atau Sejumlah SKPD		

**e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Sub Bagian Keuangan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar

Rp. 745.083.708.509,- Realisasi Rp .0,- (0%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

⇒ Laporan hasil Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah daerah .

- ⇒ Laporan Hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.
- ⇒ Laporan hasil pengelolaan darurat dan mendesak .

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

##### 1. Sekretariat

###### a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
2. Ketersediaan ASN yang masih terbatas.
3. Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana
4. Arsip data masing-masing pegawai belum terkumpul seluruhnya. Hal ini dikarenakan pegawai yang bersangkutan belum menyerahkan arsipnya pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
5. Penanganan disiplin pegawai belum optimal. Beberapa kasus pegawai yang tidak disiplin sering kali terlambat dilaporkan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.

###### b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.
3. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai
4. selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup
5. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indisipliner.
6. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada

Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indisipliner

7. Perlu adanya penyampaian informasi dan rekomendasi dari atasan agar setiap pegawai memiliki minat dan semangat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui Bimtek maupun Diklat.

## **2. Bidang Anggaran**

### **a. Permasalahan**

1. Permasalahan yang dihadapi terkait Keterlambatan proses penandatanganan DPA SKPD sehingga Mengakibatkan terhambatnya Proses Percetakan DPA dan Mengalami Keterlambatan untuk dilakukan Penyerahan DPA SKPD Tahun 2025 oleh Pejabat Gubernur kepada Pimpinan SKPD;
2. Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Empat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat segera menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
4. Pada akhir bulan Januari masih terdapat 20 OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
5. Masih ada OPD yang belum mengajukan SPP/SPM Tenaga Kontrak, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK yang terbit terdapat kekeliruan pada nominal gaji yang tidak sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih verifikasi di GTK.
6. Keterlambatan penyampaian Data Rasionalisasi Anggaran Belanja oleh SKPD dalam Rangka Penyesuaian terhadap :
  - a. Penurunan target PAD yang bersumber dari PKB dan BBNKB sesuai surat edaran Kementrian dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya perlu dilakukan Rasionalisasi Belanja;

- b. Perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya perlu dilakukan Penyesuaian terhadap belanja yang dimaksud;
  - c. Penyesuaian Program/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai surat edaran Kementerian dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Selanjutnya Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
  - d. Serta Penyesuaian terhadap Kondisi mendesak atau Perubahan Prioritas Pembangunan Baik di tingkat Nasional atau Daerah Lainnya.
- b. Solusi
- 1. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan penandatanganan DPA SKPD untuk proses cetak dan diserahkan pada SKPD;

2. Terhadap permasalahan sebagaimana Huruf a Point 2 di atas dilakukan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga disiapkan konsep/skema penyesuaian/pergeseran terhadap APBD.
3. Badan Keuangan Daerah mengirimkan dokumen untuk kelengkapan penerbitan KKPD untuk 4 perangkat daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah ke Bank NTT KCP Kantor Gubernur nomor 900.1/386/BKUD3 tanggal 24 Februari 2025.
4. Bulan Februari jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 19 OPD yang belum ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. OPD yang belum mengajukan SPP/SPM LS untuk pembayaran gaji Tenaga Kontrak bulan Januari dan Februari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK sudah diproses perbaikan, untuk bulan Februari : Jasa Tendik SLB, Tenaga Guru SKO, Guru Kontrak SLB, Guru Kontrak SMA, Guru Kontrak SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
6. Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar Segera Menyampaikan Data Rasionalisasi Anggaran Belanja sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor : BU.900.1/11/BKEUDA/2025 tentang Penegasan Pemberitahuan Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan Penginputan ke dalam SIPD RI.

### **3. Bidang Perbendaharaan**

#### **a. Permasalahan**

1. OPD tidak tepat waktu menyampaikan SPP/SPM LS-Barang dan Jasa yang mengakibatkan terjadi penumpukan dokumen di akhir tahun dan tidak efektif proses penerbitan SP2D.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat penyaluran TPP April – November sehingga pembayaran TPP dilakukan bersamaan dengan TPP Desember.

3. Terdapat OPD yang belum maksimal memanfaatkan penggunaan CMS Bank NTT.
  4. Empat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat segera menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
  5. Pada akhir bulan Januari masih terdapat 20 OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
  6. Masih ada OPD yang belum mengajukan SPP/SPM Tenaga Kontrak, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK yang terbit terdapat kekeliruan pada nominal gaji yang tidak sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih verifikasi di GTK.
  7. TPP Januari sudah bisa dibayarkan, masih terdapat OPD yang belum melakukan pengajuan pada aplikasi SI TPP.
  8. Pada akhir bulan Maret masih terdapat 1 (satu) OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
  9. Jadwal penatausahaan di tutup sementara karena Bidang Anggaran melakukan pergeseran perubahan Pergub I.
- b. Solusi
1. Bidang Perbendaharaan telah menyelesaikan SPP/SPM LS-Barang Jasa yang diajukan oleh OPD menjadi SP2D dan proses transfer selesai ditanggal 30 Desember 2024.
  2. Bidang Perbendaharaan telah melakukan pembayaran TPP guru-guru tuntas sampai TPP Desember 2024.
  3. Bidang Perbendaharaan melakukan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Monitoring dan Evaluasi Aplikasi CMS pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur.
  4. Bidang Perbendaharaan telah menyelesaikan SPP/SPM LS-Barang Jasa yang diajukan oleh OPD menjadi SP2D dan proses transfer selesai ditanggal 30 Desember 2024.
  5. Bidang Perbendaharaan telah melakukan pembayaran TPP guru-guru tuntas sampai TPP Desember 2024.

6. Bidang Perbendaharaan melakukan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Monitoring dan Evaluasi Aplikasi CMS pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur.
7. Badan Keuangan Daerah mengirimkan dokumen untuk kelengkapan penerbitan KKPD untuk 4 perangkat daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah ke Bank NTT KCP Kantor Gubernur nomor 900.1/386/BKUD3 tanggal 24 Februari 2025.
8. Bulan Februari jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 19 OPD yang belum ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. OPD yang belum mengajukan SPP/SPM LS untuk pembayaran gaji Tenaga Kontrak bulan Januari dan Februari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK sudah diproses perbaikan, untuk bulan Februari : Jasa Tendik SLB, Tenaga Guru SKO, Guru Kontrak SLB, Guru Kontrak SMA, Guru Kontrak SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
10. Sampai Bulan Maret jumlah OPD yang sudah dibayarkan TPP Januari ada 15 (lima belas) yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Ketegakerjaan dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. Sampai akhir Maret jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 33 OPD yang belum, ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

12. Sampai selesai tahapan penganggaran maka tahapan penatausahaan dapat dibuka kembali.

#### **4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

##### **a. Permasalahan**

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Akuntansi dan Pelaporan tidak ada. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan pelaporan, penyerapan anggaran per 31 Maret 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah sesuai kondisi riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.

#### **5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota**

##### **a. Permasalahan**

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2024.
2. Belum tepat waktunya Kab/Kota menyampaikan RKP DBH-CHT TA.
3. Belum tepat waktunya beberapa Kabupaten dan Kota dalam menyampaikan hard copy dan soft copy Perda dan Perbup APBD TA 2025. Kabupaten yang belum menyampaikan hard copy yakni: Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTS Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Kupang. Kabupaten yang belum menyampaikan soft copy yakni Kabupaten Endedan Kabupaten Rote Ndao.

##### **b. Solusi**

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menyampaikan

RKP DBH- CHT TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.

3. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyampaikan hard copy dan soft copy Perda dan Perbup APBD TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah ini disusun, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, April 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
Drs. BENHARD MENO, MT

PEMBINA TINGKAT I (IV/B)

NIP. 19720512 199101 1 001